

Judul : Marak hoaks dan scammer, ruang digital makin tak sehat
Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Marak Hoaks Dan Scammer

Ruang Digital Makin Tak Sehat



Sukamta

WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti maraknya aksi penipuan digital (scamming) dan hoaks di media sosial. Kedua persoalan ini saling berkaitan yakni bebasnya penggunaan identitas anonim di dunia digital. Akun anonim di media sosial (medsos) leluasa menyebarkan hoaks dan memanipulasi opini publik.

Sukamta menyarankan Pemerintah membatasi akun anonim ini. "Kebijakan satu orang satu akun bertujuan agar tidak ada orang yang punya motif kriminal atau sesuatu yang dilarang di undang-undang bersembunyi di balik anonimisme," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji wacana pembatasan satu orang satu akun medsos. Kajian ini juga mencakup aturan agar setiap akun medsos terkait dengan satu nomor ponsel, termasuk pembatasan jumlah nomor yang dapat digunakan oleh satu orang.

Sukamta melanjutkan, pada prinsipnya anonim harus ditiadakan. Tujuannya agar ada nama dan identitas yang terang di dunia digital. Namun kebijakan itu perlu dibahas lebih lanjut. Apakah cukup dengan cara satu akun satu orang, atau dibutuhkan cara yang lain. "Yang penting adalah orang harus pakai identitas asli," tegasnya.

Selain itu, Sukamta mendukung rencana pembatasan nomor telepon melalui verifikasi faktual dengan menggunakan

identitas asli saat pendaftaran. Kebijakan ini dapat dilaksanakan asalkan tetap mempertimbangkan keberagaman dan kondisi masyarakat di lapangan.

Dulu, kenang dia, memang ada rencana Pemerintah untuk membuat setiap pendaftaran dengan harus menyertakan identitas asli dan verifikasi faktual. "Untuk handphone baru yang sudah modern dan canggih, itu bisa dilakukan," ucap politikus PKS ini.

Sukamta menilai, permasalahan utama di dunia digital tidak hanya berkaitan dengan banyaknya akun atau identitas anonim, tetapi juga terkait dengan penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan literasi digital kepada masyarakat yang perlu diperkuat. "Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi secara tepat dan tidak mudah terpengaruh hoaks," harap Sukamta.

Untuk itu, dia mendorong Komdigi menghadirkan solusi yang menyeluruh dan inklusif. Tujuannya agar ruang digital Indonesia menjadi tempat yang sehat, aman, dan adil. "Bukan sekadar bebas dari anonim, tapi juga bebas dari ketakutan, manipulasi, dan diskriminasi kebijakan," harap dia.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh juga mendorong pembatasan akun ganda di medsos. Sebab hal itu kerap dimanfaatkan untuk penggiangan opini, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga aksi perundungan (bullying) di ruang digital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Komdigi sebenarnya memiliki kewenangan melakukan kontrol hingga penutupan akun-akun ilegal. Namun, Komdigi masih ragu-ragu dalam menutup akun ilegal. Mereka hanya berani melakukan take down pada konten judi online dan pornografi, sementara konten hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian masih harus menunggu izin instansi terkait. ■ TIF